

## MEMBANGUN SINERGI ANTARA KESEJAHTERAAN FORMAL DAN INFORMAL (SUATU KAJIAN ATAS TANTANGAN DAN KELEBIHAN)

MUHAMMAD WASRIK N'CONO

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*mwasrik1313@gmail.com*

### ABSTRAK

Kesejahteraan merupakan hak dasar setiap individu. Namun, akses terhadap hak tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan budaya masyarakat. Kesejahteraan formal yang dijamin oleh negara melalui undang-undang dan lembaga formal seperti lembaga pemerintah, seringkali tidak mampu menjangkau masyarakat secara merata, terutama di wilayah-wilayah pedesaan dan kota-kota kecil. Di sisi lain, kesejahteraan informal yang tergantung pada hubungan sosial, kekerabatan, dan kepercayaan masyarakat, dapat menjadi alternatif bagi mereka yang sulit mengakses kesejahteraan formal. Namun, kesejahteraan informal juga dapat memiliki kelemahan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan individu secara keseluruhan. Oleh karena itu, tulisan ini akan mencoba membahas perbedaan antara kesejahteraan formal dan informal dalam akses dan praktik masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan formal memiliki kelemahan seperti Kesulitan dalam mencakup semua kebutuhan Masyarakat, Tidak fleksibel dalam menangani permasalahan yang kompleks, hal demikian berbeda dengan kesejahteraan informal yang lebih Fleksibilitas dan adaptabilitas, sehingga perlu ada sinergi antara kesejahteraan formal dan informal, sinergi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, dengan meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam program kesejahteraan formal. Kedua, dengan mengakui dan memanfaatkan potensi kesejahteraan informal. Dan ketiga, dengan mengintegrasikan kesejahteraan formal dan informal dalam kebijakan pembangunan. Integrasi ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembangunan, serta membantu mengatasi ketidakpastian, ketidakadilan dalam akses, dan keterbatasan dalam kapasitas dan kualitas sumber daya.

---

**Kata kunci:** Hubungan Sosial; Kesejahteraan Formal & Informal; Kepercayaan Masyarakat

### ABSTRACT

*Welfare is a fundamental right of every individual. However, access to this right can vary depending on the context and culture of society. Formal welfare guaranteed by the state through laws and formal institutions such as government agencies often fails to reach the population evenly, especially in rural areas and small towns. On the other hand, informal welfare, which relies on social relationships, kinship, and community trust, can be an alternative for those who struggle to access formal welfare. However, informal welfare also has its weaknesses and may not fully meet individual needs. Therefore, this paper attempts to discuss the differences between formal and informal welfare in terms of access and societal practices. Research findings indicate that formal welfare has weaknesses such as difficulties in addressing all of society's needs and inflexibility in dealing with complex issues, unlike informal welfare, which offers more flexibility and adaptability. Thus, there is a need for synergy between formal and informal welfare, which can be achieved through various means. Firstly, by enhancing access and community involvement in formal welfare programs. Secondly, by recognizing and leveraging the potential of informal welfare. Thirdly, by integrating formal and informal welfare into development policies. This integration can enhance the effectiveness and efficiency of development programs and help address uncertainties, access inequalities, and limitations in resource capacity and quality.*

---

**Keywords:** Social Relationships; Formal & Informal Well-being; Community Trust

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan formal dan kesejahteraan informal adalah dua konsep yang berbeda dalam membahas cara manusia memperoleh hak-hak kesejahteraan. Kesejahteraan formal adalah hak kesejahteraan yang diakui oleh negara dan dilindungi oleh hukum. Contohnya adalah hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial seperti asuransi kesehatan dan program bantuan sosial. Kesejahteraan informal, di sisi lain, merujuk pada hak-hak kesejahteraan yang berasal dari hubungan sosial informal, seperti keluarga, tetangga, dan komunitas.

Salah satu perbedaan antara kesejahteraan formal dan kesejahteraan informal adalah sumber dan cakupan hak-hak kesejahteraan. Kesejahteraan formal berasal dari negara dan mencakup hak-hak kesejahteraan yang diakui oleh hukum. Negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial kepada warga negaranya melalui sistem sosial, termasuk program-program kesejahteraan seperti program asuransi kesehatan, jaminan sosial, dan tunjangan pengangguran. Sebagai contoh, di Indonesia, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di kalangan keluarga miskin dan rentan. Program ini memberikan bantuan finansial dan layanan sosial kepada keluarga miskin dan rentan, seperti anak-anak yang tidak bersekolah dan ibu hamil. (Suradi, 2007)

Sementara itu, kesejahteraan informal berasal dari hubungan sosial informal, seperti keluarga, tetangga, dan komunitas. Hak-hak kesejahteraan yang diperoleh dari hubungan sosial informal ini seringkali bersifat non-hukum dan tidak dilindungi oleh negara. Misalnya, di Indonesia, masyarakat memiliki tradisi gotong royong yang erat, di mana mereka saling membantu dalam kegiatan sehari-hari, seperti membersihkan jalan, merenovasi rumah, atau memberikan sumbangan untuk membiayai acara-acara sosial. Gotong royong adalah bentuk kesejahteraan informal di mana masyarakat saling membantu untuk memperbaiki kondisi sosial dan lingkungan mereka. (Lukiyanto & Wijayaningtyas, 2020)

Perbedaan lain antara kesejahteraan formal dan kesejahteraan informal adalah cara akses dan distribusi hak-hak kesejahteraan. Kesejahteraan formal memiliki cara akses yang baku dan prosedur yang diatur oleh negara. Misalnya, program bantuan sosial yang diberikan oleh negara harus melalui proses pendaftaran, verifikasi data, dan penyaluran melalui rekening bank penerima manfaat. Namun, dalam kesejahteraan informal, cara akses dan distribusi hak-hak kesejahteraan tidak selalu baku dan terkadang bersifat fleksibel.

Landasan teoritis dari konsep kesejahteraan formal dan kesejahteraan informal dapat dijelaskan sebagai berikut pertama Kesejahteraan Formal, Konsep kesejahteraan formal memiliki landasan teoritis yang terkait dengan teori kontrak sosial. Teori ini menekankan bahwa negara dan masyarakat memiliki hubungan saling memberi dan menerima, di mana negara memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat, dan masyarakat memberikan dukungan dan ketaatan kepada negara. Konsep ini mengasumsikan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mendapatkan akses ke kesejahteraan yang disediakan oleh negara. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk memberikan layanan sosial dan kesejahteraan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi. (Adminuniv, 2021)

Landasan teoritis lain dari kesejahteraan formal adalah teori welfare state, yang menekankan bahwa negara harus memainkan peran aktif dalam memberikan perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi warga negaranya. (Collington, 2022) Teori ini mengasumsikan bahwa pasar tidak dapat memberikan perlindungan sosial yang cukup dan adil bagi masyarakat, dan oleh karena itu negara harus memainkan peran aktif dalam memberikan layanan sosial dan kesejahteraan. Oleh karena itu, kesejahteraan formal sering dikaitkan dengan negara kesejahteraan (welfare state) di mana negara memiliki tanggung jawab penuh dalam memberikan layanan sosial dan kesejahteraan bagi warganya. (Lindell et al., 2022)

Kedua adalah Kesejahteraan Informal Konsep kesejahteraan informal memiliki landasan teoritis yang berbeda dengan kesejahteraan formal. Konsep ini lebih berkaitan dengan teori moral ekonomi (moral economy) dan teori ekonomi politik. Teori moral ekonomi menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan bahwa akses terhadap sumber daya dan layanan sosial seharusnya tidak tergantung pada negara atau pasar. Teori ini mengasumsikan bahwa masyarakat memiliki kewajiban moral untuk membantu satu sama lain, dan bahwa kesejahteraan masyarakat tergantung pada solidaritas sosial dan kerjasama. (Husna, 2014).

Sementara itu, teori ekonomi politik menekankan bahwa akses terhadap sumber daya dan layanan sosial dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi. Teori ini mengasumsikan bahwa masyarakat yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang kuat cenderung mendapatkan akses yang lebih baik ke sumber daya dan layanan sosial. Oleh karena itu, kesejahteraan informal sering kali terkait dengan komunitas atau kelompok sosial tertentu yang memiliki jaringan sosial dan ekonomi yang kuat. Berdasarkan pada hal-hal sebagaimana dikemukakan bahwasanya penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis tentang tantangan dan kelebihan kesejahteraan formal dan informal serta Bagaimana konsep Membangun Sinergi antara Kesejahteraan Formal dan Informal

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah :

1. Bagaimana tantangan dan kelebihan kesejahteraan formal dan informal?
2. Bagaimana konsep Membangun Sinergi antara Kesejahteraan Formal dan Informal

## **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui dan memberikan analisis terhadap tantangan dan kelebihan kesejahteraan formal dan informal. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian penelitian ini juga akan memaparkan tentang konsep membangun sinergi antara kesejahteraan formal dan informal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang di dukung dengan data empiris, yaitu pengumpulan data dengan meneliti data primer yang merupakan hasil wawancara terhadap data sekunder yaitu data yang tersedia di lapangan serta menelaah fakta yang terjadi, sejalan dengan pengamatan kemudian dikaji dengan tinjauan kepustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait guna memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang ada di masyarakat.(Nasution, 2016)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tantangan dan Kelebihan Kesejahteraan Formal dan Informal**

Kesejahteraan formal adalah sistem yang disediakan oleh negara melalui undang-undang, kebijakan, dan program-program sosialnya untuk memastikan kesejahteraan warganya. Ada beberapa kelebihan yang bisa ditemukan dalam sistem kesejahteraan formal, dan beberapa di antaranya adalah yang pertama bahwa kesejahteraan ini telah menyediakan jaminan keamanan sosial. Salah satu kelebihan utama dari sistem kesejahteraan formal adalah menyediakan jaminan keamanan sosial bagi warga negara. Sistem ini menyediakan perlindungan bagi mereka yang membutuhkan, termasuk orang tua, penyandang disabilitas, dan keluarga yang miskin. Contohnya, program bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah beberapa program yang memberikan bantuan langsung kepada warga yang membutuhkan.(Kik & Imang, 2019)

Selain itu kedua kesejahteraan formal juga dapat mendorong mobilitas sosial. Dalam sistem ini, pemerintah memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan atau mendapatkan akses ke pendidikan dan pelatihan. Program seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Pra Kerja, dan beasiswa pendidikan merupakan contoh program yang mendukung mobilitas sosial. Melalui program ini, warga negara dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sehingga dapat memperbaiki kehidupan mereka dan keluarga mereka di masa depan.

Dalam konteks negara Indonesia kesejahteraan formal dapat diidentifikasi dalam konstitusi negara, Kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dijelaskan dalam beberapa pasal yang menekankan pentingnya negara untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah beberapa pasal dalam UUD 1945 yang terkait dengan kesejahteraan:(Taqiuddin, 2021)

- a. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pada bagian awal UUD 1945, terdapat pernyataan tentang tujuan negara Indonesia, salah satunya adalah "untuk membentuk pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum."
- b. Pasal 27 Ayat (2) Pasal ini menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."
- c. Pasal 28D Ayat (1) Pasal ini menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."
- d. Pasal 33 Pasal ini mengatur tentang perekonomian nasional dan mencantumkan prinsip ekonomi yang berlandaskan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta berdikari. Pasal ini juga mengakui pentingnya sektor ekonomi yang dikelola oleh negara dan sektor swasta untuk mencapai kesejahteraan.
- e. Pasal 34 Pasal ini mengatur hak atas pendidikan yang bermutu dan layak bagi setiap warga negara. Pendidikan yang bermutu dianggap sebagai salah satu fondasi penting untuk mencapai kesejahteraan.

- f. Pasal 34 Ayat (2) Pasal ini mengatur tentang tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas pendidikan dan memberikan bantuan kepada warga yang kurang mampu.
- g. Pasal 34 Ayat (3) Pasal ini mengatur tentang kewajiban orangtua untuk memelihara, mendidik, dan mengajarkan anak-anaknya agar mencapai kesejahteraan.
- h. Pasal 35 Ayat (1) Pasal ini menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Prinsip ini juga berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan bagi rakyat.

Konsep kesejahteraan formal sendiri memiliki beberapa tantangan yang harus diatasi dalam penerapannya. Berikut ini adalah beberapa tantangan dari konsep kesejahteraan formal:(Hadiyono, 2020)

a. Kesulitan dalam mencakup semua kebutuhan Masyarakat

Konsep kesejahteraan formal dalam pemberian layanan publik mengalami kesulitan dalam mencakup semua kebutuhan masyarakat. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan memberikan pelayanan yang merata. Hal ini terutama terjadi di daerah-daerah yang terisolasi atau masyarakat miskin yang sulit dijangkau. Sehingga terdapat ketimpangan dalam akses terhadap layanan publik antara kota dan desa serta antara masyarakat kaya dan miskin.

Contohnya, di beberapa negara, seperti India dan Indonesia, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam akses ke layanan kesehatan dan pendidikan antara kota dan desa. Masyarakat desa seringkali memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan karena kurangnya fasilitas dan sumber daya yang tersedia di daerah tersebut.

b. Tidak fleksibel dalam menangani permasalahan yang kompleks

Konsep kesejahteraan formal seringkali tidak fleksibel dalam menangani permasalahan yang kompleks dan unik pada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah cenderung bersifat umum dan tidak dapat menangani permasalahan yang kompleks secara spesifik. Hal ini terjadi karena pemerintah harus mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Contohnya, dalam sistem kesehatan publik di beberapa negara, pasien seringkali merasa tidak terlayani dengan baik karena kebutuhan mereka tidak dapat terpenuhi oleh standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini terutama terjadi pada pasien dengan kondisi medis yang kompleks atau langka yang membutuhkan perawatan khusus yang mungkin tidak tersedia di sistem kesehatan publik.

Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kesejahteraan formal, maka selanjutnya pembahasan pada bagian ini juga akan membahas mengenai kelemahan dan kelebihan kesejahteraan informal. Kesejahteraan informal, meskipun seringkali dianggap sebagai bentuk kesejahteraan yang kurang formal dan terorganisir, sebenarnya memiliki kelebihan yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah dua kelebihan dari konsep kesejahteraan informal:

1. Fleksibilitas dan adaptabilitas Salah satu kelebihan dari kesejahteraan informal adalah fleksibilitas dan adaptabilitasnya dalam menangani berbagai situasi yang terjadi dalam masyarakat. Karena kesejahteraan informal sering kali didasarkan pada hubungan sosial dan jaringan masyarakat, maka kesejahteraan ini dapat dengan mudah beradaptasi dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Sebagai contoh, dalam keadaan darurat atau bencana alam, kesejahteraan informal dapat menjadi lebih efektif dan responsif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak. Dalam situasi seperti ini, kesejahteraan formal seringkali terbatas oleh aturan dan prosedur yang rumit, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk merespons situasi darurat.
2. Pemberdayaan masyarakat Kesejahteraan informal juga dapat memperkuat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kesejahteraan informal, masyarakat dianggap sebagai mitra yang aktif dalam menciptakan dan mempertahankan kesejahteraan mereka. Masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kesejahteraan, sehingga terdapat rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Contoh dari pemberdayaan masyarakat melalui kesejahteraan informal adalah program padat karya di Indonesia. Program ini didasarkan pada kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan infrastruktur di desa-desa. Dalam program ini, masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Konsep kesejahteraan informal memiliki beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan dalam eksistensinya. tantangan utama yang sering dihadapi dalam implementasi konsep kesejahteraan informal seperti pertama adanya Ketidakpastian dan ketidakadilan dalam akses Salah satu tantangan utama dari konsep kesejahteraan informal adalah ketidakpastian dan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya dan layanan sosial. Kesejahteraan informal sangat bergantung pada jaringan sosial dan kerjasama antara anggota komunitas. Namun, tidak semua anggota komunitas memiliki akses yang sama terhadap jaringan sosial dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memperoleh kesejahteraan. Misalnya, dalam masyarakat yang sangat terfragmentasi, seperti di perkotaan, orang yang tinggal di lingkungan yang lebih terpencil dan terisolasi mungkin tidak memiliki akses yang

sama dengan orang yang tinggal di lingkungan yang lebih padat penduduknya. Akibatnya, mereka mungkin kesulitan mendapatkan sumber daya dan layanan sosial yang dibutuhkan, seperti akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

Selain itu, meskipun kerjasama antar anggota komunitas dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi, tetapi konflik antara kelompok atau individu dalam komunitas juga dapat menghambat akses ke sumber daya dan layanan sosial. Sebagai contoh, jika kelompok dalam komunitas saling bersaing untuk mendapatkan akses ke sumber daya atau memperoleh keuntungan tertentu dari kerjasama, hal ini dapat menghambat upaya meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Kedua tantangan dari eksistensi kesejahteraan informal dapat berupa Keterbatasan dalam kapasitas dan kualitas Tantangan lain dari kesejahteraan informal adalah keterbatasan dalam kapasitas dan kualitas sumber daya dan layanan sosial yang tersedia dalam konteks informal. Dalam banyak kasus, sumber daya dan layanan sosial yang tersedia dalam konteks informal mungkin tidak memadai atau berkualitas rendah, karena tidak ada lembaga formal yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pemantauan. Misalnya, dalam konteks kesejahteraan informal di pedesaan, mungkin terdapat keterbatasan dalam akses terhadap infrastruktur, seperti jalan, air bersih, dan sanitasi. Selain itu, layanan kesehatan mungkin terbatas dan berkualitas rendah, dan tidak ada lembaga formal yang memantau dan mengatur praktik kesehatan yang dilakukan oleh para praktisi kesehatan informal.

Di sisi lain, keterbatasan dalam kapasitas dan kualitas sumber daya dan layanan sosial informal juga dapat terjadi karena kurangnya dukungan dan investasi dari pemerintah atau lembaga formal lainnya. Dalam banyak kasus, lembaga formal cenderung mengabaikan atau bahkan mengekang praktik-praktik kesejahteraan informal, karena dianggap tidak memadai atau tidak layak

### **Membangun Sinergi antara Kesejahteraan Formal dan Informal**

Membangun sinergi antara kesejahteraan formal dan informal adalah suatu cara untuk mengatasi kelemahan dari masing-masing konsep tersebut dan memaksimalkan keuntungan dari keduanya. Ada beberapa cara untuk membangun sinergi antara kesejahteraan formal dan informal, diantaranya adalah :

Pertama Meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam program kesejahteraan formal, Salah satu cara untuk membangun sinergi antara kesejahteraan formal dan informal adalah dengan meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam program kesejahteraan formal. Dalam hal ini, pemerintah bisa memperluas jangkauan program-program kesejahteraan formal, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat dijangkau oleh program tersebut. Pemerintah juga bisa melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program kesejahteraan formal, sehingga program-program tersebut lebih tepat sasaran dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya, program-program pemberian bantuan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan) atau BLT (Bantuan Langsung Tunai) dapat diperluas jangkauannya dan diikuti dengan edukasi bagi masyarakat tentang bagaimana cara mengelola bantuan tersebut dengan baik. Hal ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program tersebut dan memperkuat sinergi antara kesejahteraan formal dan informal. (Ruaida et al., 2022)

Kedua Mengakui dan memanfaatkan potensi kesejahteraan informal dimana Pemerintah juga bisa mengakui dan memanfaatkan potensi kesejahteraan informal yang ada di masyarakat. Kesejahteraan informal dapat membantu mengatasi kekurangan dari kesejahteraan formal, dan sebaliknya kesejahteraan formal dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dari kesejahteraan informal. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan dukungan untuk kesejahteraan informal, seperti memberikan pelatihan atau pendampingan bagi pengusaha mikro dan kecil, atau memberikan akses ke pasar yang lebih luas bagi produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Contohnya, di Indonesia terdapat program-program seperti Desa Mandiri atau Gerakan Desa Emas yang bertujuan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam program-program tersebut, pemerintah memberikan dukungan bagi pengusaha mikro dan kecil dalam bentuk pelatihan dan pendampingan, serta memfasilitasi akses ke pasar yang lebih luas bagi produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat. (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2021)

Ketiga adalah dengan cara mengintegrasikan kesejahteraan formal dan informal dalam kebijakan Pembangunan, hal ini merupakan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembangunan. Integrasi tersebut dapat dilakukan dengan cara mempertimbangkan keberadaan dan peran kesejahteraan informal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Kesejahteraan formal dan informal memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Kesejahteraan formal, yang disediakan oleh negara melalui undang-undang dan program-program sosial, menawarkan jaminan keamanan sosial dan dapat mendorong mobilitas sosial. Namun, ia seringkali kesulitan dalam mencakup semua

kebutuhan masyarakat dan kurang fleksibel dalam menangani permasalahan yang kompleks. Di sisi lain, kesejahteraan informal, yang bergantung pada hubungan sosial dan kepercayaan masyarakat, menawarkan fleksibilitas dan pemberdayaan masyarakat. Namun, ia juga rentan terhadap ketidakpastian, ketidakadilan dalam akses, dan memiliki keterbatasan dalam kapasitas dan kualitas sumber daya. Untuk mengatasi tantangan dari masing-masing konsep ini, penting untuk membangun sinergi antara kesejahteraan formal dan informal. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam program kesejahteraan formal, mengakui dan memanfaatkan potensi kesejahteraan informal, serta mengintegrasikan kesejahteraan formal dan informal dalam kebijakan pembangunan.

## Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Perlu adanya Integrasi Kesejahteraan Formal dan Informal Dalam perencanaan kebijakan pembangunan, perlu mempertimbangkan peran kesejahteraan informal dan mengintegrasikannya dengan program-program formal. Ini akan membantu menciptakan solusi yang lebih holistik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Perlu adanya Pemantauan dan Evaluasi hal ini penting untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas program kesejahteraan, baik formal maupun informal. Hal ini akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan bijaksana.
3. Masyarakat perlu diberikan informasi yang cukup mengenai program kesejahteraan yang tersedia, baik formal maupun informal. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, mereka dapat lebih aktif dalam memanfaatkan program-program ini untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adminuniv. (2021). Teori Kesejahteraan Sosial. *Fisip Umsu*.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2021). Upaya Pemerintah untuk Memajukan UMKM Indonesia. *BPKM/Investasi*.
- Collington, R. (2022). Disrupting the Welfare State? Digitalisation and the Retrenchment of Public Sector Capacity. *New Political Economy*, 27(2). <https://doi.org/10.1080/13563467.2021.1952559>
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tatangannya. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN*, 1(1). <https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2672>
- Husna, N. (2014). Ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 6(23).
- Kik, F. E. A., & Imang, U. (2019). Kesejahteraan sosial masyarakat bandar di kawasan perumahan. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(6).
- Lindell, J., Jakobsson, P., & Stiernstedt, F. (2022). The media welfare state: A citizen perspective. *European Journal of Communication*, 37(3). <https://doi.org/10.1177/02673231211046792>
- Lukiyanto, K., & Wijayaningtyas, M. (2020). Gotong Royong as social capital to overcome micro and small enterprises' capital difficulties. *Helikon*, 6(9). <https://doi.org/10.1016/j.helikon.2020.e04879>
- Nasution, B. J. (2016). Metode Penelitian Ilmu Hukum. In 2.
- Ruaida, D., Ridwan, M., & Ningsih, V. R. (2022). Program pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun. *Health Promotion and Community Engagement Journal*, 1(1).
- Suradi. (2007). Pembangunan manusia, kemiskinan dan kesejahteraan sosial. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(3).
- Taqiuddin, H. U. (2021). Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, dan Konstitusi Sosial. *Econetica*, Vol. 3 No.(November).